

SKRIPSI

**KOLABORASI MODEL *PENTA HELIX*
DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN
DI KOTA MAKASSAR**

**ADE RAHAYU AZZAHRA PUTRI
(E011191076)**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRAK

Ade Rahayu Azzahra Putri (E011191076), Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar, xii + 98 halaman + 3 gambar + 8 tabel + 35 pustaka + 6 lampiran, (1995-2022). Dibimbing Oleh Drs. Lutfi Atmansyah. MA dan Dr. Amril Hans S.AP., M.PA

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar dengan menggunakan model Penta Helix. Dalam penelitian ini, model Penta Helix yang digunakan berasal dari gagasan Ansell dan Gash pada tahun 2008 tentang Collaborative Governance in Theory.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam terhadap tujuan penelitian sehingga diperoleh informasi yang valid. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada konsep analisis proses kolaborasi Ansell dan Gash, yaitu Dialog tatap muka, Membangun kepercayaan, Komitmen terhadap proses, Berbagi pemahaman, dan Hasil akhir.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses kolaborasi yang ada saat ini di Kota Makassar dalam penanganan anak jalanan dengan menggunakan model Penta Helix belum efektif. Proses kolaborasi antar sektor belum optimal, diperparah dengan kurangnya sinergitas di antara semua aktor yang terlibat. Akibatnya, penanganan anak jalanan di Kota Makassar belum dapat ditangani secara efektif.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

ABSTRACT

Ade Rahayu Azzahra Putri (E011191076), Collaboration Of The Penta Helix Model In Handling Street Children In Makassar City, xiii + 98 page + 3 picture + 8 table + 35 references + 6 attachment, (1995-2022). Supervised by Drs. Lutfi Atmansyah. MA and Dr. Amril Hans S.AP., M.PA

This research aims to analyze how collaboration works in handling street children in Makassar City using the Penta Helix model. In this research, the Penta Helix model used comes from Ansell and Gash's 2008 ideas about Collaborative Governance in Theory.

This research uses a qualitative approach with descriptive methods to comprehensively and in-depth analyze the research objectives so that valid information is obtained. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. This research focuses on the analytical concept of Ansell and Gash's collaboration process, namely face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, sharing understanding, and final results.

The results of this research indicate that the current collaboration process in Makassar City in handling street children using the Penta Helix model is not yet effective. The collaboration process between sectors is not yet optimal, exacerbated by the lack of synergy between all actors involved. As a result, street children in Makassar City cannot be handled effectively.



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ADE RAHAYU AZZAHRA PUTRI

NIM : E011 19 1076

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **KOLABORASI MODEL PENTA HELIX DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR** benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 29 Februari 2024



ADE RAHAYU AZZAHRA PUTRI

E011191076



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

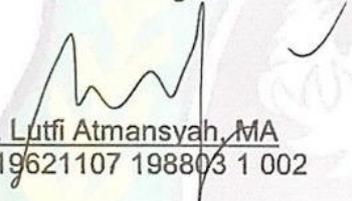
Nama : ADE RAHAYU AZZAHRA PUTRI
NIM : E011 19 1076
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : KOLABORASI MODEL *PENTA HELIX* DALAM
PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA
MAKASSAR

Telah di periksa oleh Ketua Jurusan dan Pembimbing serta dinyatakan layak untuk diajukan kesidang skripsi Program Ilmu Administrasi Publik Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

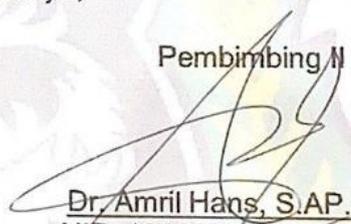
Makassar, 16 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Drs. Lutfi Atmansyah, MA
NIP. 19621107 198803 1 002

Pembimbing II


Dr. Amril Hans, S.AP., M.PA
NIP. 19820706 202204 3 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik,


Prof. Dr. Alwi, M.Si
NIP. 19631015 198903 1 006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : ADE RAHAYU AZZAHRA PUTRI
NIM : E011 19 1076
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Tugas Akhir : Kolaborasi Model Penta Helix Dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji skripsi dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, Maret 2024

Tim Penguji Skripsi,

Ketua : Drs. Lutfi Atmansyah, MA

Sekretaris : Dr. Amril Hans, S.Ap., MPA

Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA

2. Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesehatan kesempatan ridho, dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kolaborasi Model *Penta Helix* dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar”** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana S1 Jurusan Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti sekarang ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu, penulis sangat mengharapkan dan terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan karya ini kedepannya. Untuk itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini terkhusus orang tua yang telah memberikan seluruh energi positifnya kepada penulis hingga menyelesaikan masa perkuliahan.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jomp, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Alwi, M.Si. selaku ketua Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staf pengajar yang telah memberikan bantuan,

bimbingan, serta ilmu sejak pertama kali duduk dibangku kuliah hingga penyelesaian studi.

4. Drs. Lutfi Atmansyah, MA selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing I dalam penyusunan skripsi Dr. Amril Hans, S.AP., M.PA selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya, pikiran, memberikan saran dan kritik membangun yang sangat membantu dalam penelitian skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Yunus, MA dan Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos., M.Si selaku Dosen Penguji dalam sidang proposal dan skripsi. Terima kasih banyak telah memberikan saran, masukan, dan kritik yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Para Dosen Departemen Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin terima kasih banyak peneliti ucapkan atas didikan, ilmu, dan motivasi yang selama ini diberikan, semoga apa yang peneliti peroleh dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
7. Seluruh Staf Departemen Ilmu Administrasi Publik (Ibu Rosmina, Pak Lili) dan seluruh Staf di lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas seluruh bantuannya selama ini baik selama perkuliahan hingga saat ini.
8. Terima kasih kepada seluruh lembaga yang telah memberikan bantuan kepada peneliti selama melakukan penelitian di lokasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Saudara-Saudara tak sedarah tetapi melebihi dari saudara yang disebut sebagai RUMAH (Yuyu, Via, Besse, Resti, Naurah, Dibar, Rahimah, Uta, Tasya, Syl, Lisa). Terima kasih telah kebersamaan dan mewarnai masa-masa perkuliahan serta memberikan support yang tak henti-hentinya kepada penulis
10. M I R A C L E 19 terima kasih banyak atas segala dukungan yang telah diberikan dari awal hingga sekarang. Terimakasih banyak telah menjadi teman yang baik selama perkuliahan peneliti.
11. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar HUMANIS FISIP UNHAS atas segala pengalaman, kebersamaan, cerita, dan proses belajar yang telah dilalui peneliti.

12. Terima kasih kepada Nur Intan Ismail dan Tri Ayuni Affair Jumail dan Yuliani Arni Ardin sebagai teman terdekat yang telah membantu, mendukung dengan memberikan saran, masukan serta semangat kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi hingga saat ini.

Serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat dituliskan satu persatu. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi seluruh pembaca. Akhir kata penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 29 Februari 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
II.1 Konsep Kolaborasi Model <i>Penta Helix</i>	8
II.1.1 <i>Collaborative Governance</i> Menurut Ansell dan Gash	8
II.1.2 Model Penta Helix	12
II.1.3 Faktor-Faktor Keberhasilan <i>Collaborative Governance</i>	16
II.2 Konsep Anak Jalanan	17
II.2.1 Pengertian Anak Jalanan	17
II.3.2 Kategori Anak Jalanan	18
II.3.3 Faktor Munculnya Anak Jalanan.....	21
II.4 Penanganan Anak Jalanan.....	24
II.4.1 Model Penanganan Anak Jalanan.....	24
II.4.2 Multi Aktor dalam Penanganan Anak Jalanan.....	26

II.5 Penelitian Terdahulu	30
II.6 Kerangka Berpikir.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
III.1 Pendekatan Penelitian	34
III.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	34
III.3 Fokus Penelitian.....	35
III.4 Teknik Pengumpulan Data	36
III.5 Sumber Data	37
III.6 Teknis Analisis Data Kualitatif	38
III.7 Narasumber dan Informan.....	40
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	41
IV.1 Gambaran Umum Sosial dan Anak Jalanan di Kota Makassar	41
IV.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan	47
IV.2.1 Aktor <i>Collaborative Penta Helix</i> Yang Terlibat.....	47
IV.2.2 Hambatan dan Solusi <i>Collaborative Governanace Pentahelix</i> dalam Penanganan Anak Jalanan.....	48
IV.2.2 Proses <i>Collaborative Governance</i>	50
IV.2.3 Proses <i>Collaborative Model Penta Helix</i> dalam penanganan anak jalanan.....	53
BAB V PENUTUP.....	82
VI.1 Simpulan.....	82
VI.2 Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Makassar...	2
Tabel II. 1 Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan.....	26
Tabel II. 2 Penelitian Terdahulu	30
Tabel IV. 1 Pemetaan Permasalahan Naiknya Angka Kemiskinan.....	44
Tabel IV. 2 Pemetaan Permasalahan Naiknya Angka Kemiskinan.....	45
Tabel IV. 3 Program Pembangunan Bidang Sosial	46
Tabel IV. 4 Aktor yang Terlibat dalam Kolaborasi Model <i>Penta Helix</i>	48
Tabel IV. 5 Hambatan dan Solusi dalam Proses Kolaborasi.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Model <i>Collaborative Governance</i> menurut Ansell dan Gash	12
Gambar II. 2 Model <i>Penta Helix</i>.....	14
Gambar II. 3 Skema Kerangka Pikir Penelitian	33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang masih menjadi tantangan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kemiskinan dapat mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga, sehingga mendorong anak-anak untuk mencari uang di luar rumah dengan cara yang tidak terhormat, seperti mengemis, menjadi anak jalanan, atau menjadi gelandangan. Penyebab kemiskinan adalah internal (keterbatasan pendidikan, pengetahuan, akses kesehatan, kurangnya keterampilan untuk meningkatkan potensi) dan eksternal (kebijakan pemerintah, sosial dan bencana alam) (Setiawan, 2022).

Pembangunan yang terjadi di Indonesia pada saat ini telah membawa perubahan signifikan pada berbagai aspek kehidupan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Perubahan tersebut tidak hanya terlihat pada lingkungan fisik, tetapi juga sistem nilai dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, sayangnya, perubahan yang dihasilkan oleh pembangunan juga membawa dampak yang kompleks dan mengerikan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan di masyarakat.

Apabila diperhatikan dengan seksama, maka kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan kemiskinan struktural atau buatan, karena sebenarnya Indonesia memiliki potensi dan sumber daya yang cukup untuk menghindari kemiskinan. Kemiskinan struktural terjadi akibat dari adanya super struktur yang membuat sebagian kelompok atau anggota masyarakat tertentu mendominasi sarana ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang kompleks di kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Makassar. Fenomena ini merupakan dampak dari berbagai faktor, antara lain kemiskinan, kekerasan dalam keluarga, pengabaian hak anak, dan kurangnya akses ke Pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyebutkan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkatkecerdasan sesuai dengan minat, termasuk anak jalanan.”

Penanganan anak jalanan di Kota Makassar melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi sosial, hingga masyarakat. Meskipun begitu, penanganan masalah ini masih belum optimal karena masih terdapat kekurangan dalam koordinasi antarpihak dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Tabel I. 1

Data anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Makassar

NO	Tahun	Anak Jalanan	Gelandangan dan Pengemis	Jumlah
1	2020	268 orang	142 orang	410 orang
2	2021	276 orang	193 orang	469 orang
3	2022	375 orang	140 orang	515 orang

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar 2023

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, pada tahun 2020 PMKS yang terjaring berjumlah 410 orang (268 anak jalanan, 142 gelandangan dan pengemis, Pada Tahun 2021, jumlah tersebut mengalami kenaikan, menjadi 469 orang dengan rincian 276 anak jalanan, 193

gelandangan dan pengemis dan pada tahun 2022 terjadi lagi kenaikan jumlah menjadi 515 orang dengan rincian 375 anak jalanan dan 140 orang gelandangan dan pengemis.

Kenaikan signifikan jumlah anak jalanan antara tahun 2021 dan 2022 menjadi perhatian serius bagi Dinas Sosial Kota Makassar. Dinas Sosial merupakan sektor utama yang bertanggung jawab atas tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial di kota tersebut. Dinas. Meskipun kolaborasi dan kerjasama yang solid antara Satpol PP dan Kepolisian sudah terlaksana, tidak bisa dianggap sebagai indikator bahwa masalah anak jalanan di kota Makassar telah selesai. Masalah anak jalanan adalah masalah sosial yang kompleks, yang sulit untuk diselesaikan sepenuhnya. Meskipun kita bisa menciptakan keteraturan hari ini, kemungkinan besok masalah ini akan muncul lagi, dan anak jalanan kembali aktif di jalanan.

Kolaborasi yang dibangun oleh Dinas Sosial Kota Makassar dengan melibatkan Satpol PP dan pihak kepolisian telah menciptakan sinergi yang kuat dalam penanganan masalah pengamen di kota tersebut. Melalui tim terpadu ini, mereka berhasil melakukan kerja sama tetapi belum berhasil mengatasi laju perkembangan anak jalanan di Kota Makassar. Hal ini menyoroti pentingnya penerapan prinsip kolaborasi pemerintah yang efektif, yang dapat meningkatkan kualitas layanan publik dengan lebih baik dan responsif dalam lingkup birokrasi pemerintah daerah. Keterlibatan beberapa aktor tersebut masih belum optimal dikarenakan masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam masalah anak jalanan ini.

Dalam konteks ini, penelitian memberikan solusi tentang bagaimana mengatasi laju perkembangan anak jalanan di Kota Makassar kepada Dinas Sosial Kota Makassar bekerja sama secara erat dengan lima pihak utama

dalam pendekatan kolaborasi penta helix, yaitu pemerintah, industri, akademisi, masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi yang kuat dan sinergi antara sektor-sektor ini diharapkan dapat mengoptimalkan layanan anak jalanan.

Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam penanganan anak jalanan dengan meningkatkan kerja tim, berbagi pengetahuan, sumber daya, dan ide antara berbagai pihak yang terlibat. Dengan melakukan kolaborasi yang lebih kuat dan sinergis, Dinas Sosial Kota Makassar diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan, serta menjadi lebih adaptif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan anak jalanan.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, penelitian ini menganggap perlu adanya revitalisasi fungsi institusi Dinas Sosial Kota Makassar agar mampu mengadopsi pendekatan kolaboratif dan sinergis dengan Penta Helix. Dengan demikian, layanan anak jalanan di kota Makassar dapat ditingkatkan secara signifikan dalam hal efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas.

Dari hasil penelitian Wijaya, et.al (2021) yang berjudul *"Revitalizing Institutional Functions In Handling Street Children: Good Practices From Indonesia"* menyimpulkan bahwa dalam penanganan anak jalanan di kota Makassar, Dinas Sosial Kota Makassar perlu melakukan revitalisasi fungsi institusi dengan pendekatan yang lebih kolaboratif dan sinergis dengan pendekatan Penta Helix untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan adaptabilitas layanan anak jalanan.

Pemerintah Kota Makassar telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah ini, seperti memberikan bantuan sosial berupa sembako,

obat-obatan, dan pakaian kepada mereka yang membutuhkan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja bagi anak-anak jalanan agar mereka dapat memiliki keterampilan dan kesempatan yang lebih baik untuk memperbaiki kondisi hidup mereka.

Namun, masalah anak jalanan masih menjadi salah satu tantangan yang signifikan bagi Kota Makassar. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kota Makassar terus memantau dan memperkuat upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, keluarga, dan lembaga pemerintah. Dengan adanya upaya yang terintegrasi dan dukungan dari semua pihak, diharapkan fenomena anak jalanan di Kota Makassar dapat diminimalisir dan anak-anak jalanan dapat diberikan kesempatan untuk hidup dengan layak dan sejahtera.

Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas peran dan kolaborasi multiaktor dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar dengan menggunakan model kolaborasi Penta Helix. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran pemerintah, bisnis/swasta, media, organisasi sosial, dan masyarakat dalam penanganan masalah ini, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran mereka. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah anak jalanan di Kota Makassar. Penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran multiaktor dalam penanganan masalah sosial di Indonesia, sehingga dapat dijadikan

sebagai referensi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih baik dan efektif.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kolaborasi Model *Penta Helix* dalam Penanganan Anak Jalanan di Kota Makassar”**.

I.2 Rumusan Masalah

Melalui hal tersebut, maka diangkatlah perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana kolaborasi yang dijalankan dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini ialah, Untuk mengetahui bagaimana proses kolaborasi model *Penta Helix* multi aktor dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar.

I.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademik

1. Meningkatkan pemahaman tentang cara berkolaborasi berbagai aktor dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar, sehingga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanganan masalah tersebut.

2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Kolaborasi multi aktor dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar.
 3. Membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang penanganan anak jalanan di Kota Makassar, terutama dalam memperdalam pemahaman tentang kolaborasi model Penta Helix.
- b. Manfaat Praktis.
1. Memperkuat kerjasama dan koordinasi antara multi aktor dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar.
 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang anak jalanan sehingga dapat membantu mengatasi stigma dan diskriminasi yang sering diterima oleh kelompok tersebut.
 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan anak jalanan di Kota Makassar.
 4. Mendorong pengembangan kebijakan publik baik pemerintah maupun non-pemerintah yang lebih baik dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar, sehingga dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat dan anak jalanan yang ada di Kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Kolaborasi Model *Penta Helix*

II.1.1 *Collaborative Governance* Menurut Ansell dan Gash

Collaborative Governance adalah suatu sistem pengelolaan pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat secara langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif melalui musyawarah. Tujuan dari kolaborasi pemerintahan ini adalah untuk merancang atau menerapkan kebijakan publik dan mengelola program pemerintah.

Selanjutnya, penjelasan Ansell & Grash (2008) disampaikan dengan lebih rinci, menegaskan bahwa konsep *Collaborative Governance* muncul karena sengaja diciptakan secara sadar dengan alasan-alasan tertentu. Kesimpulannya adalah bahwa *Collaborative Governance* hadir karena kesengajaan dan dibuat dengan penuh kesadaran karena beberapa alasan, yaitu:

- a. Kompleksnya hubungan dan ketergantungan antar organisasi.
- b. Konflik kepentingan antar kelompok yang sulit diselesaikan karena sudah menjadi bagian yang melekat
- c. Penggunaan solusi baru untuk memenuhi legitimasi politik
- d. Kegagalan implementasi program di lapangan
- e. Kurangnya kemampuan beberapa kelompok karena pemisahan rezim kekuasaan pada organisasi lain yang menghambat pengambilan Keputusan

- f. Peningkatan mobilisasi sebagai bentuk pengorganisasian kelompok
- g. Tingginya anggaran dan intervensi politik dalam kebijakan.

Ansell dan Gash (2008) menyatakan bahwa *Collaborative Governance* adalah suatu proses kerjasama yang melibatkan pengaturan keputusan dalam pembuatan kebijakan oleh berbagai lembaga publik dan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan menyelesaikan permasalahan publik. Menurut Model *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008) terdapat empat variabel utama, yaitu ;

- a. **Kondisi awal (*Starting Condition*)**, dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh berbagai fenomena, termasuk keberadaan kepentingan dan visi bersama dari para pemangku kepentingan, sejarah kerjasama sebelumnya, saling penghargaan terhadap kolaborasi yang telah terjalin, tingkat kepercayaan di antara pemangku kepentingan, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan pengetahuan
- b. **Desain kelembagaan (*Institutional Design*)**, mengacu pada aturan dasar dalam kolaborasi, menjadi esensial karena memberikan legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Fokus desain kelembagaan melibatkan aturan partisipasi, pembentukan forum, peraturan pelaksanaan yang jelas, dan transparansi dalam proses kolaborasi
- c. **Kepemimpinan Fasilitatif (*Facilitative Leadership*)**, terkait dengan musyawarah antara pemangku kepentingan, penetapan aturan dasar yang jelas, pembangunan kepercayaan, fasilitasi dialog antar pemangku kepentingan, dan pembagian keuntungan bersama.

Kolaborasi seringkali melibatkan tingkat konflik dan ketidakpercayaan yang tinggi, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi.

- d. **Proses Kolaborasi (*Collaborative Procces*)**, Model proses tata kelola kolaboratif terkadang menggambarkan kolaborasi sebagai pengembangan bertahap. Model kolaborasi panggung penting untuk menarik perhatian pada perubahan strategi kolaborasi seiring dengan perubahan konteks. Representasi dari Ansell dan Gash mengenai proses kolaborasi sebagai sebuah siklus jelas merupakan penyederhanaan yang besar. Namun hal ini memerlukan perhatian pada bagaimana masukan dari kolaborasi awal dapat mempengaruhi kolaborasi selanjutnya secara positif atau negative.

Ansell dan Gash (2008) mengungkapkan bahwa sulit menentukan awal dari proses kolaborasi, Namun, karena komunikasi adalah inti dari kolaborasi, kami memulainya dengan dialog tatap muka. Sub dari proses kolaborasi ini adalah ;

a. *Face to face dialogue*

Proses *collaborative* berasal dari dialog langsung tatap muka yang melibatkan semua pemangku kepentingan atau seluruh stakeholder yang terlibat. *Face to face dialogue* ini memiliki signifikansi yang besar dalam mengakui peluang dan manfaat bagi kelompok, menjadi ciri khas dari *collaborative governance* yang berorientasi pada proses.

b. *Trust building*

Kolaborasi merupakan usaha saling membangun kepercayaan antara para pemangku kepentingan, bukan hanya sekadar untuk keperluan negosiasi. Membangun rasa percaya diperlukan pada saat proses kolaborasi dimulai.

c. *Commitment to process*

Dalam proses kolaborasi, terdapat proses komitmen yang merupakan keinginan atau motivasi para partisipan untuk terlibat dalam tata kelola kolaborasi. Diperlukan komitmen serius dari setiap pemangku kepentingan untuk menghindari risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam proses kolaborasi. Kolaborasi merupakan usaha untuk saling membangun kepercayaan antar pemangku kepentingan, bukan hanya untuk keperluan negosiasi. Pembangunan rasa percaya perlu dilakukan sejak awal proses kolaborasi dimulai.

d. *Share understanding*

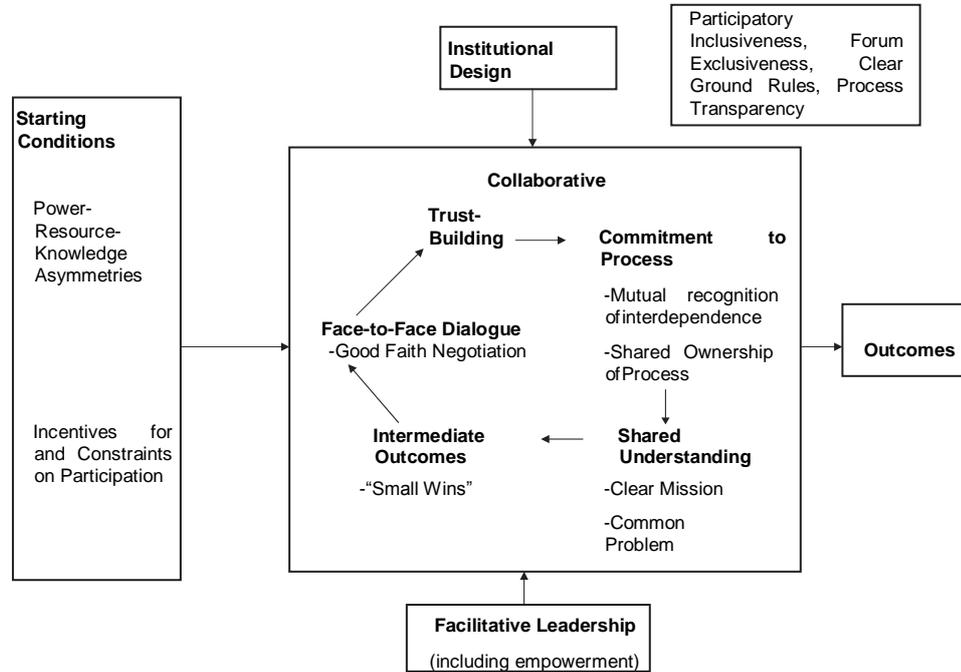
Dalam proses kolaborasi, semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama dalam mencapai tujuan dari proses tersebut. Ini berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses harus setuju dengan apa yang dapat mereka capai bersama.

e. *Intermediate outcomes*

Dalam proses kolaborasi, terdapat hasil atau output yang merupakan produk dari pencapaian tujuan dan manfaat kolaborasi, serta adanya kemenangan kecil dari kolaborasi tersebut.

Gambar II. 1

Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash



Sumber: Ansell and Gash, 2008

II.1.2 Model Penta Helix

Umumnya, kolaborasi *Penta Helix* merujuk pada bentuk kerjasama yang melibatkan lima pihak yang dikenal sebagai ABCGM (Akademisi, Bisnis, Masyarakat, Pemerintah, Media) dalam suatu proyek. Harapannya, melalui kolaborasi pentahelix, pencapaian tujuan dapat lebih inklusif, cepat, dan konkret karena pelaksanaan program diperkuat oleh keterlibatan lima kelompok berbeda, masing-masing dengan peran dan keahlian khususnya (Wahyuningsih, 2021).

Kolaborasi Model *Penta Helix* Menurut Priambudi (2022) merupakan perluasan dari strategi triple helix dengan melibatkan berbagai elemen lembaga masyarakat atau non-profit dalam rangka mewujudkan inovasi.

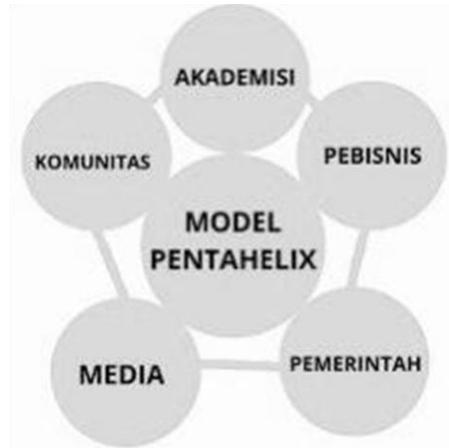
Konsep pentahelix yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media bertujuan untuk mengembangkan inovasi pengetahuan yang memiliki potensi bertransformasi menjadi produk maupun jasa yang bernilai dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan menemukan pola kemitraan melibatkan berbagai pihak dan peran, tujuan tersebut juga mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam mencapai percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, dan perbaikan lingkungan hidup.

Ringkasnya, konsep pentahelix adalah salah satu cara dalam mengatasi masalah dan mengembangkan program dengan melibatkan lintas sektor untuk saling berbagi peran. Yang menjadi titik fokus pentahelix adalah kolaborasi antara pemerintah bersama para pemangku kepentingan hingga masyarakat

Dengan mengintegrasikan kelima elemen ini dalam satu ekosistem, model *Penta Helix* bertujuan untuk mendorong kolaborasi, pertukaran pengetahuan, dan sinergi antara sektor-sektor yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan pengembangan yang lebih inovatif dan berkelanjutan dalam industri kreatif. Melalui kolaborasi lintas sektor, model ini berupaya menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan industri kreatif, merangsang inovasi, dan mendorong adopsi teknologi baru.

Gambar II. 2

Model *Penta Helix*



Sumber : Website Dinas Pariwisata Kab. Ciamis 2023

Menurut Soemaryani (2016), model *Penta Helix* adalah sebuah acuan atau panduan yang digunakan untuk mengembangkan sinergi antara instansi yang terkait dalam mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Model ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang efektif antara berbagai pihak terkait guna mencapai hasil yang diinginkan.

Kelima komponen dalam model *Penta Helix* memiliki kontribusi yang saling terkait, antara lain:

1. **Akademisi (*academics*)**, Merupakan sumber daya pengetahuan yang memiliki konsep dan teori dalam menangani anak jalanan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.
2. **Bisnis/swasta (*business/swasta*)**, Merupakan entitas yang terlibat dalam pengolahan barang atau jasa yang memberikan nilai tambah.

3. **Komunitas (*community*)**, Merupakan individu atau kelompok yang memiliki minat yang sama dan relevan terhadap perkembangan masalah atau kasus di penanganan anak jalanan.
4. **Pemerintah (*government*)**, Merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam menangani anak jalanan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyusun regulasi, kebijakan, dan memberikan respon terhadap penanganan anak jalanan
5. **Media (*media*)**, Merupakan pemangku kepentingan yang memiliki akses informasi yang lebih luas dan memainkan peran yang kuat dalam masalah anak jalanan. Media berperan dalam menyebarkan informasi tentang peran seluruh masyarakat terkait penanganan anak jalanan.

Kolaborasi di antara kelima komponen ini dapat menghasilkan sinergi yang kuat dalam penanganan anak jalanan. Akademisi menyediakan pengetahuan, bisnis mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam produk dan layanan, komunitas memberikan masukan dan partisipasi masyarakat, pemerintah menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung, dan media berperan dalam penanganan yang efektif. Melalui kerjasama yang erat, kelima komponen ini dapat saling melengkapi dan menciptakan Kota Makassar yang lebih tinggi tingkat kesejahteraan sosialnya.

II.1.3 Faktor-Faktor Keberhasilan *Collaborative Governance*

DeSeve (2007) membagi delapan aspek yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *Collaborative Governance*, yaitu:

a. *Networked Structure*

Struktur Terhubung merujuk pada hubungan yang saling terkait antara elemen-elemen yang bersatu dan mencerminkan aspek fisik dari jaringan yang dikelola. Dalam pelaksanaan pengelolaan kolaboratif, disarankan untuk menghindari pembentukan hierarki atau konsentrasi kekuasaan pada satu entitas.

b. *Commitment to A Common Purpose*

Komitmen terhadap Tujuan Bersama merupakan inti dari pembentukan jaringan atau *network*, yang bertujuan untuk mempertahankan komitmen dalam mencapai tujuan bersama antara pihak yang terlibat.

c. *Trust Among the Participants*

Kepercayaan di Antara Peserta merupakan hubungan yang terjalin di antara individu dalam konteks profesional, sosial, dan melibatkan keyakinan untuk saling mempercayai terkait informasi atau upaya dari pemangku kepentingan lainnya dalam suatu jaringan, dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama.

d. *Governance*

Governance merupakan hubungan saling kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat. Ada peraturan yang telah disetujui dan kebebasan untuk menentukan jalannya strategi kolaborasi.

e. *Access to Authority*

Access to Authority adalah kemungkinan atau ketersediaan hak untuk menjalankan prosedur yang terdefinisi dengan jelas dan dapat diterima oleh semua pihak tanpa membedakan setiap pemangku kepentingan.

f. *Distributive Accountability/ Responsibility*

Distributive Accountability/Responsibility adalah suatu bentuk pengelolaan atau manajemen di mana para pihak terlibat bekerja sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi tanggung jawab guna mencapai tujuan yang diinginkan.

g. *Information Sharing*

Berbagi informasi memudahkan pihak terkait dalam bekerja sama, memberikan akses yang lebih mudah, melindungi data pribadi, dan membatasi akses untuk mereka yang bukan anggota.

h. *Access to Resources*

Dalam menjalankan kerja sama praktis untuk mencapai tujuan, tidak hanya diperlukan kontribusi tenaga kerja, tetapi juga diperlukan ketersediaan dana, dukungan teknis, dan berbagai sumber daya lain yang diperlukan oleh setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi tersebut.

II.2 Konsep Anak Jalanan

II.2.1 Pengertian Anak Jalanan

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya.

Selain itu, Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia, Departemen Sosial (2001: 30) memaparkan bahwa anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya, usia mereka berkisar dari 6 tahun sampai 18 tahun. Anak jalanan biasanya menghabiskan waktu lebih dari 4 jam dalam sehari di jalanan, baik itu karena mereka mencari nafkah secara sukarela atau karena dipaksa oleh orang tua mereka. Tujuan mereka di jalan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah.

“those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life”.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa anak jalanan adalah anak-anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan atau tempat umum lainnya, baik itu untuk mencari penghasilan atau hanya sekedar berkeliaran.

II.3.2 Kategori Anak Jalanan

Untuk mengakomodasi variasi anak jalanan maka anak jalanan tersebut dibagi kepada beberapa kategori. Departemen Sosial RI menyusun tiga kategori

anak jalanan. Kategori tersebut didasarkan pada bentuk-bentuk strategi pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam kluster anak jalanan. Adapun tiga kategori anak jalanan, yaitu ;

1. *Children on the street*

Children on the street adalah anak-anak yang tinggal dan tumbuh di jalanan, yang dimana anak-anak tersebut hanya sesaat saja di jalanan, biasanya yang terdiri dari anak-anak dari luar kota dan dari dalam kota.

2. *Children of the street/road*

Anak jalanan yang termasuk dalam kategori "*Children of the street/road*" adalah anak-anak yang tinggal di jalanan dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di jalanan, mereka tidak memiliki tempat tinggal dan jarang atau bahkan tidak pernah berhubungan dengan keluarga mereka.

3. *Vulnerable to be street children*

Kategori anak jalanan yang rentan atau berpotensi menjadi anak terlantar disebut sebagai "*Vulnerable to be street children*". Ini berarti bahwa jika anak-anak ini tidak diawasi dan dibina dengan baik, mereka berisiko besar menjadi anak jalanan. Meskipun mereka masih memiliki hubungan keluarga yang cukup kuat, namun hidup mereka tidak stabil dan seringkali berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan resiko yang tinggi.

Sementara itu UNICEF membedakan anak jalanan menjadi dua bagian, yaitu ;

1. Anak-anak yang timbul dari jalanan (*children of the street*), yang pada intinya bahwa motivasi mereka untuk hidup di jalan adalah karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga orang tuanya.
2. Anak-anak yang ada di jalan (*children on the street*), yang menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di jalan bukan sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangganya.

Kemudian Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia telah membedakan anak jalanan menjadi empat kelompok, yaitu :

1. Anak-anak yang telah menggunakan jalanan sebagai ruang hidup mereka dan tidak lagi memiliki hubungan dengan orang tua disebut sebagai "*children of the street*". Kelompok ini dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis dalam keluarga seperti kekerasan, penolakan, penyiksaan, dan perceraian orang tua. Biasanya, mereka enggan untuk kembali ke rumah dan kehidupan di jalanan serta solidaritas dengan sesama anak jalanan menjadi pengikat mereka.
2. Adalah anak-anak yang bekerja di jalanan dan tidak teratur dalam berhubungan dengan orang tua disebut sebagai "*children on the street*". Mereka sering diidentifikasi sebagai pekerja migran kota yang pulang tidak teratur ke kampung halaman mereka. Mereka biasanya bekerja dari pagi sampai sore seperti menyemir sepatu, pengasong, pengamen, tukang ojek payung, dan kuli panggul. Mereka tinggal di lingkungan kumuh bersama saudara atau teman sejenis.
3. Anak-anak yang tinggal bersama orang tua mereka tetapi menghabiskan beberapa jam di jalanan karena berbagai alasan seperti ajakan teman,

belajar mandiri, atau membantu orang tua disebut sebagai anak jalanan yang "berhubungan langsung dengan orang tua". Mereka kebanyakan biasanya menjual koran sebagai aktivitas utama mereka di jalanan.

4. Anak jalanan yang berusia di atas 16 tahun dan berada di jalanan untuk mencari pekerjaan disebut sebagai kaum urban yang mengikuti orang dewasa ke kota. Mereka telah lulus SD atau bahkan SLTP dan biasanya melakukan pekerjaan seperti mencuci bus, menyemir sepatu, membawa barang belanjaan (kuli panggul), pengasong, pengamen, pengemis, atau pemulung (Hairani Siregar dkk, 2006).

II.3.3 Faktor Munculnya Anak Jalanan

Kemiskinan merupakan faktor pertama yang menyebabkan munculnya anak jalanan, baik miskin ekonomi, maupun miskin mental spiritual. Munculnya anak jalanan dapat dipandang sebagai hasil dari kegagalan keluarga dalam memenuhi tiga fungsi dasar, yaitu pemenuhan kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis dalam bentuk kasih sayang dan afeksi, serta pemenuhan kebutuhan bermasyarakat. Dalam keadaan seperti ini, anak-anak merasa terdorong untuk mencari kelompok dan hubungan sosial di jalanan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut yang seharusnya didapatkan dari keluarga (Evra dkk, 2013).

Banyak faktor yang dapat mendorong anak untuk meninggalkan rumah dan hidup di jalanan. Paling tidak, terdapat tiga faktor utama yang dapat memicu anak untuk menjadi anak jalanan, yaitu:

1. Tingkat mikro (*immediate causes*), melibatkan faktor-faktor yang terkait dengan anak dan keluarganya. Ada beberapa alasan mengapa

seorang anak memilih untuk pergi dari rumah, seperti tinggal bersama orang tua yang sering menggunakan kekerasan, atau merasa terpinggirkan dan tidak diurus dengan baik oleh orang tua. Jika situasi ini berlangsung terus-menerus, anak cenderung akan memilih untuk kabur dan hidup di jalanan. Beberapa faktor yang berasal dari keluarga termasuk ketidakmampuan orang tua untuk memberikan kebutuhan dasar dan dukungan psikologis, pengabaian atau kasar terhadap anak, dan kesulitan berkomunikasi dengan keluarga karena terpisah dari orang tua. Sebab-sebab ini biasanya berhubungan satu sama lain.

2. Tingkat meso (*underlying cause*), Dalam konteks struktur masyarakat, faktor yang mempengaruhinya adalah terkait dengan kelas masyarakat, di mana ada yang termasuk kelompok miskin dan kaya. Di antara keluarga miskin, anak-anak sering diikutsertakan dalam mencari tambahan penghasilan bagi keluarga. Hal ini terjadi terutama pada komunitas masyarakat miskin. Anak-anak dianggap sebagai aset untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga dan diajarkan untuk bekerja di masyarakat lain. Secara umum, sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat dewasa dan anak-anak di masyarakat miskin untuk pergi ke kota dan bekerja.
3. Tingkat makro, (*basic cause*), Dalam konteks ini, faktor yang terkait dengan organisasi sosial dapat memiliki pengaruh besar karena struktur tersebut dianggap memiliki status sebagai penyebab dan akibat yang sangat penting. Sebagai contoh, jika seseorang menghabiskan banyak waktu di jalanan, maka hal ini dapat menghasilkan uang yang lebih banyak. Namun, untuk dapat mencapai

hal ini, seseorang membutuhkan modal dan keahlian yang besar, dan untuk memperoleh uang yang lebih banyak, mereka harus mengorbankan waktu yang cukup lama di jalanan dan mengorbankan pendidikan formal (Hairani Siregar dkk, 2006).

Menurut Miftahulhair (2018) penyebab interen gelandangan karena sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik dan cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi situasi tersebut ialah ;

1. Faktor Ekonomi, seperti kurangnya kesempatan kerja, kemiskinan, pendapatan per kapita yang rendah, dan kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.
2. Faktor Geografi, seperti daerah asal yang gersang dan tandus, yang tidak memungkinkan untuk pengolahan tanah.
3. Faktor Sosial, seperti meningkatnya urbanisasi dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya kesejahteraan
4. Faktor Pendidikan, seperti rendahnya tingkat pendidikan yang menyebabkan kurangnya keterampilan untuk hidup yang layak, serta kurangnya pendidikan informal di dalam keluarga dan masyarakat.
5. Faktor Psikologis, seperti perpecahan atau konflik dalam keluarga.
6. Faktor Kultural, seperti adat istiadat dan keyakinan yang menjadi hambatan mental dalam mengatasi situasi tersebut.
7. Faktor Lingkungan, seperti kondisi lingkungan yang tidak mendukung bagi keluarga yang telah menjadi gelandangan atau memiliki anak.

8. Faktor Agama, seperti kurangnya pemahaman akan ajaran agama yang menyebabkan kurangnya kepercayaan.

Jika orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan anak mereka, maka mereka telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak anak mereka. Hal ini sesuai dengan UU No. 4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, yang menyatakan bahwa kesejahteraan anak yang dapat menjamin kehidupan dan penghidupan, yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara jasmani, rohani maupun sosial adalah tanggung jawab orang tua. Namun, jika orangtua tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak mungkin harus membantu mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja dan kehilangan masa kanak-kanak yang seharusnya diisi dengan bermain dan bersenang-senang. Ini mungkin menjadi pilihan yang tidak dapat dihindari bagi keluarga yang mengalami ketidakberdayaan finansial.

II.4 Penanganan Anak Jalanan

II.4.1 Model Penanganan Anak Jalanan

Menurut Suyanto (2010:214) selama ini beberapa pendekatan yang lazim dilakukan oleh LSM dalam menangani anak jalanan adalah sebagai berikut:

1. *Street Based*

Salah satu metode untuk mengatasi masalah anak jalanan adalah dengan menggunakan model penanganan di mana mereka diidentifikasi berdasarkan asal atau tempat tinggal mereka. Kemudian, street educator akan mendatangi mereka untuk berdiskusi,

memberikan pendampingan dalam pekerjaan, memahami dan menerima situasi mereka, dan bertindak sebagai teman. Dalam beberapa jam, anak-anak akan diberikan materi pendidikan dan keterampilan, serta hubungan yang hangat dan perhatian yang akan meningkatkan kepercayaan satu sama lain dan membantu mencapai tujuan intervensi.

2. Centre Based

Cara yang digunakan adalah mengurus anak-anak yang hidup di jalanan dengan menemukannya di sebuah panti. Di sana, mereka akan mendapat perhatian dan layanan seperti makanan, perlindungan, serta perhatian yang ramah dari para pekerja sosial. Selain itu, di panti asuhan permanen tersebut juga disediakan layanan-layanan seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan kesehatan, kesenian, dan kesempatan kerja untuk anak-anak jalanan.

3. Community Based

Penanganan anak jalanan melalui pendekatan berbasis masyarakat melibatkan partisipasi semua pihak di masyarakat, terutama keluarga atau orang tua dari anak-anak tersebut. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mencegah anak-anak tersebut terjerumus ke dalam kehidupan jalanan. Pendekatan ini bersifat preventif dengan memberikan kegiatan sosialisasi tentang pengasuhan anak dan upaya peningkatan taraf hidup kepada keluarga, serta memberikan kesempatan pada anak untuk mendapatkan pendidikan formal atau informal, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat, dan aktivitas lainnya. Diharapkan dengan

adanya pendekatan ini, keluarga dan masyarakat dapat memperkuat diri dan siap melindungi, merawat, dan memenuhi kebutuhan anak-anak mereka dengan cara yang mandiri.

Jika kita mengaitkan pendekatan program/strategi yang telah disebutkan dengan klasifikasi anak jalanan, maka akan terlihat dalam tabel II.1. Tabel II.1 juga menunjukkan bahwa intervensi memiliki lebih dari satu fungsi, tetapi yang dicatat hanya fungsi utama.

Tabel II. 1

Pendekatan dan Penanganan Anak Jalanan

Pengelompokan Anak Jalanan	Pendidikan Program/Strategi	Fungsi Intervensi
Anak yang masih berhubungan/tinggal dengan orang tua	Community based	Preventif
Anak yang masih ada hubungan dengan keluarga tetapi jarang berhubungan/tinggal dengan orang tua	Street Based	Perlindungan
Anak tersisih/putus hubungan dengan keluarga/orang tua	Centre Based	Rehabilitasi

Sumber: Mulandar (2010:159)

II.4.2 Multi Aktor dalam Penanganan Anak Jalanan

1. Pemerintah

Penanganan anak jalanan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuat kebijakan-kebijakan, dimana kebijakan atau program penanganan dan penanggulangan anak termasuk penanggulangan sosial, Pendidikan ,peningkatan sumber daya manusia, pemerataan pendapatan dan kesejahteraan.

Terdapat beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah guna mengatasi persoalan anak jalanan dan anak terlantar, diantaranya yaitu:

1. Menjalankan program beasiswa.
2. Memberikan kesempatan kerja atau peluang magang.
3. Menyelenggarakan kelompok belajar usaha.
4. Program-program lainnya yang berdampak tidak langsung terhadap pengurangan jumlah anak jalanan dan anak terlantar.

Pemerintah daerah memiliki peran ganda dalam mengatasi permasalahan anak jalanan, selain sebagai pelayan publik. Selain itu, pemerintah daerah juga berperan sebagai fasilitator, penyedia layanan publik, pendamping, mitra, dan juga sebagai penyedia dana.

2. Lembaga Swadaya Masyarakat

Sebelum menjadi populer dengan sebutan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), istilah yang sudah dikenal sejak awal 1970-an untuk menyebut organisasi yang tidak berafiliasi dengan pemerintah adalah Ornop (Organisasi Non Pemerintah). Istilah Ornop digunakan sebagai terjemahan dari NGO (Non Government Organization) dalam lingkup internasional (Rusmin, Tumanggor dkk, 2005).

Sejak awal tahun 1970-an, upaya untuk menggabungkan perkembangan ekonomi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum telah dimulai. Hal ini dilakukan bersamaan dengan kemunculan organisasi non-pemerintah (Ornop) atau yang dikenal sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). LSM telah memainkan peran dalam beberapa aspek pembangunan yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, yaitu pengembangan ekonomi yang berfokus pada pemerataan dan berskala mikro untuk masyarakat pedesaan dan kelompok masyarakat yang kurang mampu (Midgley dalam Abbas, 2005).

LSM yang tidak berafiliasi dengan pemerintah sangat membantu dalam mendorong pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat. LSM tersebut menjadi alternatif bagi masyarakat yang menderita atau terpinggirkan oleh sistem pemerintah. Melalui advokasi, pendampingan sosial, dan pemberdayaan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan agama, LSM dapat memberikan dukungan bagi masyarakat miskin. LSM yang berada di tengah-tengah masyarakat berperan penting dalam memberikan bantuan dan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka.

Didalam buku Saidi (1995) yang berjudul "*Secangkir Kopi Max Havelaar: LSM dan Kebangkitan Masyarakat*" bahwa David Korten seorang aktivis dan pengamat LSM memberikan gambaran perkembangan LSM menjadi empat generasi berdasarkan strategi yang telah dipilihnya.

Generasi pertama disebut *relief and welfare*, yaitu dengan usaha untuk memenuhi sesuatu yang kurang dalam masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, makanan, pendidikan, dan sebagainya. LSM generasi ini mengarahkan perhatiannya pada kegiatan filantropi yang menargetkan anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial, seperti anak-anak yatim piatu, orang-orang dengan cacat, orang lanjut usia, dan sejenisnya.

Generasi kedua disebut *small scale, self reliance local development*, yaitu fokus pada usaha untuk memungkinkan LSM mengembangkan keterampilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. LSM berperan sebagai penggerak, bukan sebagai pelaku langsung. LSM berorientasi pada proyek-proyek pengembangan masyarakat.

Generasi ketiga disebut *sustainable system development*, generasi ini memiliki perspektif yang lebih luas dimaksudkan sebagai melihat bahwa situasi di tingkat lokal hanya merupakan hasil dari masalah yang lebih besar di tingkat regional atau nasional. Masalah-masalah kecil dalam masyarakat juga harus dilihat sebagai bagian dari masalah politik pembangunan nasional. Oleh karena itu, penanganan yang efektif hanya bisa terjadi melalui perubahan struktural yang mendasar.

Generasi keempat disebut *people movement*, yaitu Generasi ini berusaha agar ada transformasi struktur sosial dalam masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Ide pokoknya adalah impian untuk menciptakan sebuah dunia yang lebih baik, dan untuk itu dibutuhkan partisipasi seluruh penduduk dunia. Gerakan ini ditandai dengan diprakarsai oleh gagasan, bukan struktur organisasi yang baku.

Kehadiran LSM di Indonesia memiliki manfaat positif dalam membantu membangun masyarakat secara sosial. Sebagai lembaga independen, peran LSM dapat membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, keberadaan LSM di Indonesia seharusnya didukung sebagai upaya untuk mencapai tujuan positif ini.

LSM memegang peran penting dalam memberdayakan anak jalanan yang kurang mampu. Saat ini, jumlah anak jalanan semakin meningkat dengan cepat dan mereka sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua elemen masyarakat untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini.

II.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, akan dibahas topik mengenai model kolaborasi Penta Helix dalam penanganan anak jalanan di Kota Makassar. Berikut table penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diusulkan dalam proposal penelitian ini :

Tabel II. 2
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Pendekatan	Hasil
Siti Nurkhadijah. S (2014)	Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar	Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif kualitatif adalah menganut paham fenomenologis dan postpositivisme.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah di Kota Makassar mempunyai empat indikator, pembinaan langsung dilakukan oleh lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam bentuk pengajian yang terkadang dibina langsung oleh pemerintah, pembinaan sosial dilakukan dalam bentuk pengadaaan sosialisasi dan bakti sosial dengan tujuan mengajarkan pentingnya hidup bersih dan sebagainya, pembinaan keterampilan yang diterima oleh anak jalanan dalam bentuk keterampilan menjahit, merangkai bunga, membuat bros, teater, menari dan otomotif, dan pembinaan pendidikan formal dan informal yang di berikan kepada anak jalanan melalui dinas pendidikan dan dinas tenaga kerja yang tidak

			terlepas dari pengawasan dinas social.
Yuniarti Miftahul Jannah (2021)	Pelaksanaan Program Penanganan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Kota Makassar	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh.	Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan yang diukur berdasarkan teori Charles. Jones terkait indikator organisasi, intepretasi dan aplikasi (penerapan) belum mampu diterapkan secara efektif oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Metode pembinaan yang diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 adalah pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitas sosial. Dari hasil penelitian menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran ke jalanan untuk mengais rezeki juga masyarakat yang belum mengetahui larangan untuk tidak memberikan uang kepada anak jalanan.
Firdaus (2018)	Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Anak Jalanan Di <i>Fly Over</i> Kota Makassar	Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan pendekatan komunikasi dan sosiologi.	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran dinas sosial kota Makassar dalam penanganan anak jalanan di fly over kota Makassar yaitu melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian dan pengawasan dan melakukan kampanye dan sosialisasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar yaitu; masalah pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan, dan melakukan rehabilitas.

Dian Kangunan, Noverman Duadji, Intan Fitri Meutia	Kolaborasi Model <i>Penta Helix</i> Dalam Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran	Pendekatan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, data primer dipetik melalui wawancara dan FGD (<i>Focus Group Discussion</i>) terhadap key forman.	Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melihat dari rendahnya kesadaran kolektif berbagai aktor terhadap sikap abai selalu menunggu arahan, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai Desa Wisata Harapan Jaya. Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya menjual keasrian lokalnya, oleh karena itu pentingnya Kolaborasi Model Penta Helix.
--	---	--	--

II.6 Kerangka Berpikir

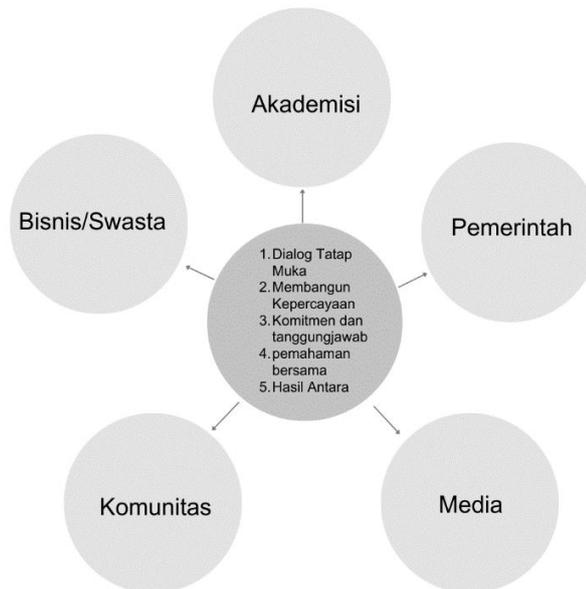
Untuk memahami bagaimana seorang peneliti menguraikan permasalahan dalam penelitiannya, sebuah alur berpikir yang disebut kerangka pikir digunakan sebagai panduan. Kerangka pikir ini mencakup langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk merumuskan dan menjawab pertanyaan penelitian. Berikut kerangka pikir yang digunakan oleh peneliti:

Upaya yang terencana dan sadar harus dilakukan dalam menangani anak jalanan untuk memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat. Semua pihak yang terlibat dalam penanganan anak jalanan seharusnya berperan aktif dalam merumuskan kebijakan untuk membina anak jalanan. Dengan melakukan penanganan yang tepat, diharapkan dapat menciptakan keseimbangan dan keserasian antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Untuk membahas bagaimana kolaborasi dalam penanganan anak jalanan, penulis menggunakan kolaborasi model *Penta Helix* yang didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan diantaranya adalah akademisi, komunitas, bisnis (ekonomi), pemerintah dan media. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar II. 3

Skema Kerangka Pikir Penelitian



Sumber : Theory Collaborative Ansell and Gash (2008)